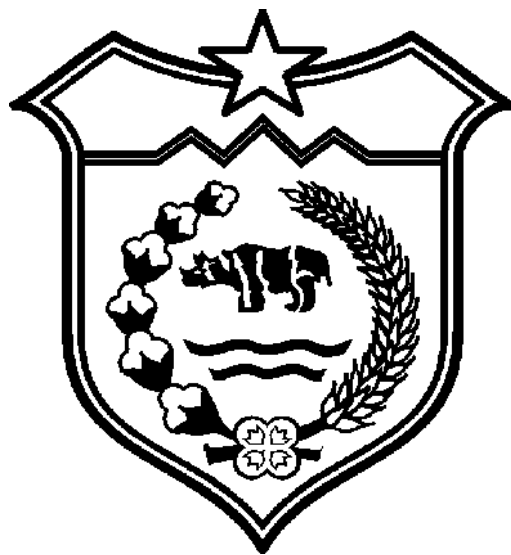


Rencana Kerja
(RENJA)

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kabupaten Pandeglang
Tahun 2013



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA
Jl. Kesehatan no. 1 Pandeglang 42213

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan.....	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD	29
3.3 Program dan Kegiatan	30
BAB IV PENUTUP	39
LAMPIRAN	



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Illahi Rabbi, karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahun 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang dapat terselesaikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Rencana Kinerja Tahun 2013 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan fungsinya, maka Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2013 yang dimuat dalam dokumen ini harus memiliki sifat spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang ini disusun menggunakan indikator keluaran (output) dan (outcome) berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam penyusunan dokumen ini masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.

Pandeglang, Juli 2012.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Pandeglang



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran tentang Rencana Kinerja Tahunan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang maka disusunlah Rencana Kerja Tahunan yang merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang dalam satu tahun dan merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional RPJMD dan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang untuk tahun yang bersangkutan. Rencana Kerja juga merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis, dan diakhiri adanya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2013 yang menyajikan target kinerja tahun 2013 dalam upaya pelaksanaan amanat yang tercantum dalam Rencana Strategik Tahun 2011-2016, tugas pokok dan fungsi serta merupakan komitmen untuk mewujudkan visi ***“Pembangunan Perdesaan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Optimalisasi Pemerintahan Desa menuju Pandeglang Mandiri dan Berkembang”***.

Dengan disusunnya RENJA sebagai rencana tindak tahun 2013, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang dapat memfokuskan arah pelaksanaan sasaran-sasaran yang tercantum dalam rencana strategis dengan disertai strategi pencapaiannya



melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2013. Dimana pada tahun 2013 diharapkan peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dapat lebih efektif.

Penetapan di muka rencana kinerja kegiatan dan sasaran akan memberi daya dorong sekaligus sebagai komitmen merencanakan dan mengendalikan sumber daya yang diserahkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang dan akan dilaporkan penggunaannya lewat Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir tahun anggaran.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Surat Edaran Bersama antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri, Republik Indonesia, Nomor 0008/M.PPN/01/2007, 050/264A/SJ, tanggal 12 Januari 2007, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang serta memperhatikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang,Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 No 1) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomer 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 No 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No 4 Tahun 2010 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang



- Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3);
 22. Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 6);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9);
 24. Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011-2016.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (RENJA) BPMPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 dibuat sebagai acuan dan pedoman bagi BPMPD Kabupaten Pandeglang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya.

Adapun maksud tujuan penyusunan RENJA BPMPD kabupaten Pandeglang Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Memudahkan pengendalian dalam pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Agar penetapan Kinerja lebih akurat sesuai dengan program dan kegiatan BPMPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013;
3. Memberikan pedoman dalam pencapaian sasaran dan target sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPMPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013;
4. Memudahkan pengevaluasian, tingkat capaian kegiatan, kemajuan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini bertujuan agar memudahkan dan terarahnya pokok bahasan dan secara berstruktur, dalam penyusunan RKT ini dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan renja skpd tahun 2011 dan 2012 dan capaian RENSTRA SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RENJA
- 2.5. Penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran RENJA SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2011 DAN 2012

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2011 dan 2012

- **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2011**

Evaluasi terhadap RENJA SKPD akan memberikan penilaian atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kegiatan ditujukan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.

Adapun kegiatan - kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang pada tahun anggaran 2011 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 13.454.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 9.362.730 sehingga terealisasi sebesar **69,59%**.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 12.600.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 12.600.000, sehingga terealisasi sebesar **100.00%**.

3. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 3.500.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 3.436.200 , sehingga terealisasi sebesar **98.18%**.

4. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan



Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 3.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2.999.900, sehingga terealisasi sebesar **100.00%**.

5. Kegiatan Rapat –rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 17.500.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 17.415.000 , sehingga terealisasi sebesar **99.51%**.
6. Kegiatan Layanan Administrasi Kantor
Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Layanan Administrasi Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 1.500.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.500.000 , sehingga terealisasi sebesar **100.00%**.
7. Kegiatan Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang
Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 11.049.500 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 11.049.000 , sehingga terealisasi sebesar **100.00%**.
8. Kegiatan Pengadaan Mebeleur
Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pengadaan Mebeleur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 10.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 9.930.000 , sehingga terealisasi sebesar **99.30%**.
9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 10.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 9.850.000 , sehingga terealisasi sebesar **98.50%**.



10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 10.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 9.150.000 , sehingga terealisasi sebesar **91.50%**.

11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 6.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 6.000.000 , sehingga terealisasi sebesar **100.00%**.

12. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 1.500.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.500.000, sehingga terealisasi sebesar **100.00%**.

13. Kegiatan Penyusunan Neraca SKPD

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Penyusunan Neraca SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 1.500.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.500.000, sehingga terealisasi sebesar **100.00%**.

14. Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa / Administrasi Umum adalah sebesar Rp. 1.500.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.500.000 , sehingga terealisasi sebesar **100.00%**.

15. Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD

Jumlah dana yang direncanakan untuk Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 1.400.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.400.000 , sehingga terealisasi sebesar **100.00%**.



16. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Jumlah dana yang direncanakan untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 1.500.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.500.000, sehingga terealisasi sebesar **100.00%**.

17. Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Jumlah dana yang direncanakan untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 1.500.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.500.000, sehingga terealisasi sebesar **100.00%**.

18. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Jumlah dana yang direncanakan untuk Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 100.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 98.925.000, sehingga terealisasi sebesar **98.93%**.

19. Kegiatan Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (Posyantekdes)

Jumlah dana yang direncanakan untuk Kegiatan Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (Posyantekdes) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 25.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 25.000.000, sehingga terealisasi sebesar **100.00%**.

20. Kegiatan Bulan Bhkati gotong royong

Jumlah dana yang direncanakan untuk Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 25.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 25.000.000, sehingga terealisasi sebesar **100.00%**.

21. Kegiatan Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) PNPM PPK

Jumlah dana yang direncanakan untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) PNPM PPK Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 300.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 298.880.000, sehingga terealisasi sebesar **99.63%**.



22. Kegiatan Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan

Jumlah dana yang direncanakan untuk Kegiatan Pembinaan Lomba/Desa Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 75.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 74.650.000 , sehingga terealisasi sebesar **99.53%**.

23. Kegiatan Penyusunan Profil Desa /Kelurahan

Jumlah dana yang direncanakan untuk Kegiatan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 20.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 19.650.000, sehingga terealisasi sebesar **98.25%**.

23. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Jumlah dana yang direncanakan untuk Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 20.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 20.000.000, sehingga terealisasi sebesar **100%**.

24. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Jumlah dana yang direncanakan untuk Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 15.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 15.000.000 , sehingga terealisasi sebesar **100%**.

25. Kegiatan Sarana dan Prasarana Posyandu

Jumlah dana yang direncanakan untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Posyandu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 105.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 104.080.000, sehingga terealisasi sebesar **99.12%**.

26. Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

Jumlah dana yang direncanakan untuk Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 50.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 49.748.000 , sehingga terealisasi sebesar **99.50%**.



27. Kegiatan Pemekaran Desa

Jumlah dana yang direncanakan untuk Kegiatan Pemekaran desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 50.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 49.600.000 , sehingga terealisasi sebesar **99.20%**.

28. Kegiatan Pembinaan Desa

Jumlah dana yang direncanakan untuk Kegiatan Pembinaan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 75.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 74.889.000 , sehingga terealisasi sebesar **99.85%**.

29. Kegiatan Penyusunan Peraturan Mengenai Desa

Jumlah dana yang direncanakan untuk Kegiatan Penyusunan Peraturan Mengenai Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 50.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 47.454.500, sehingga terealisasi sebesar **94.91%**.

30. Kegiatan Pengadaan Buku Administrasi Desa

Jumlah dana yang direncanakan untuk Kegiatan Pengadaan Buku Administrasi Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 95.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 94.181.000, sehingga terealisasi sebesar **99.14%**.

31. Kegiatan Rapat Desa

Jumlah dana yang direncanakan untuk Kegiatan Rapat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 250.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 248.866.000, sehingga terealisasi sebesar **99.55%**.

Adapun Kegiatan- kegiatan yang tidak mencapai target kinerja adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Alokasi Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah sebesar Rp. 13.454.000,- terealisasi sebesar Rp 9.362.630,-(69,59%). Hal ini disebabkan karena pembayaran tarip dimaksud disesuaikan dengan



pemakaian setiap bulan, sehingga saldo dari pagu sebesar Rp. 4.091.270,- (tidak diserap) ini terjadi karena adanya selisih lebih dari pembayaran jasa tarif listrik, telepon dan air.

- Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan alokasi Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan adalah sebesar Rp.3.500.000,- terealisasi sebesar Rp.3.436.200,- (98,18 %) . Hal ini disebabkan karena kebutuhan akan barang cetak dan penggandaan sudah terpenuhi sehingga sisa saldo sebesar Rp. 63.800,- tidak terserap.
- Kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah alokasi Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah adalah sebesar Rp. 17.500.000,- terealisasi sebesar Rp.17.415.000,-. (99,51 %) Hal ini disebabkan karena kebutuhan rapat dan kordinasi keluar daerah sudah terpenuhi sehingga sisa saldo sebesar Rp. 85.000,- tidak terserap.
- Pengadaan Mebeleur alokasi Jumlah dana yang direncanakan untuk pengadaan mebeuler kantor adalah sebesar Rp. 10.000.000,- tealisasi sebesar Rp.9.930.000,- (99,30%). Hal ini disebabkan karena kebutuhan mebeleur kantor sudah terpenuhi sehingga sisa saldo sebesar Rp. 70.000,- tidak terserap.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor alokasi Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung adalah sebesar Rp. 10.000.000,- tealisasinya sebesar Rp. 9.850.000,- (98,50%). Hal ini disebabkan karena kebutuhan dalam pemeliharaan kantor sudah terpenuhi sehingga sisa saldo sebesar Rp. 150.000,- tidak terserap.
- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaana alokasi Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Lembaga Pemberdayaan dan Organisasi Masyarakat Pedesaan adalah sebesar Rp. 90.000.000,- terealisasinya sebesar Rp. 89.925.000,-



(98,93%) . Hal ini disebabkan dari SPK pengadaan barang dan jasa sehingga sisa saldo sebesar Rp.75.000,- tidak terserap

- Kegiatan Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) PNPM-MP alokasi Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) PNPM-MP adalah sebesar Rp. 300.000.000,-tealisasinya sebesar Rp. 298.880.000,- (99,63%). Hal ini disebabkan dari selisih dari jumlah honor yang seharusnya dibayarkan sehingga sisa saldo sebesar Rp.1.120.000,- tidak terserap
- Kegiatan Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan alokasi Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pembinaan Lomba Desa / Kelurahan adalah sebesar Rp. 75.000.000,-. tealisasinya sebesar Rp. 74.650.000,- (96,53%). Hal ini disebabkan dari selisih jumlah normatif perjalanan dinas tidak sesuai ASB yang seharusnya dibayarkan sehingga sisa saldo sebesar Rp. 350.000,- tidak terserap.
- Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan alokasi Jumlah dana yang direncanakan untuk Kegiatan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp. 20.000.000,- tealisasinya sebesar Rp. 19.650.000,- (98,25%) Hal ini disebabkan adanya sisa honor Honor pelaksana kegiatan profil desa yang tidak terbayarkan sebesar Rp.350.000,- tidak terserap dan telah dikembalikan ke kas Negara.
- Kegiatan Sarana dan Prasarana Posyandu alokasi Jumlah dana yang direncanakan untuk Sarana dan Prasarana Posyandu Kegiatan adalah sebesar Rp. 105.000.000,- tealisasinya sebesar Rp. 104.080.000,-(99,12%). Hal ini disebabkan adanya kelebihan honor pada Panitia pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ASB dan dari SPK pengadaan barang dan Jasa dengan total Rp. 920.000,- tidak terserap dan telah dikembalikan kepada kas daerah.
- Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa alokasi Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasinya sebesar Rp. 49.748.000,- (99,50%). Hal ini disebabkan dari selisih jumlah normatif perjalanan dinas tidak



sesuai ASB yang seharusnya dibayarkan sehingga sisa saldo sebesar Rp.252.000,- tidak terserap dan telah dikembalikan ke kas Negara.

- **Pembinaan Desa alokasi** Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pembinaan Desa sebesar Rp. 75.000.000,- terealisasinya sebesar Rp. 74.889.000,- (99,85%) Hal ini disebabkan dari selisih jumlah normatif perjalanan dinas tidak sesuai ASB yang seharusnya dibayarkan sehingga sisa saldo sebesar Rp.111.000,- tidak terserap.
- **Kegiatan Penyusunan Peraturan Mengenai Desa alokasi** Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Penyusunan Peraturan Mengenai Desa sebesar Rp. 50.000.000. terealisasinya sebesar Rp. 47.454.500,- (95,86%). Sisa saldo sebesar Rp. 2.545.500,- tidak terserap.
- **Kegiatan Pengadaan Buku Administrasi Desa alokasi** Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pengadaan Buku Administrasi Desa sebesar Rp. 95.000.000,-. terealisasinya sebesar Rp. 94.181.000,- (99,14%). Hal ini disebabkan dari SPK pengadaan barang dan jasa sehingga sisa saldo sebesar Rp.819.000,- tidak terserap.
- **Kegiatan Rapat Desa alokasi** Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pembinaan Pembangunan Desa Terpadu sebesar Rp. 250.000.000,-. terealisasinya sebesar Rp. 248.866.000,- (99,55%) Hal ini disebabkan dari SPK pengadaan barang dan jasa sehingga sisa saldo sebesar Rp. 1.134.000,- tidak terserap.

Capaian sasaran Renstra Tahun 2011

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2011 sudah terdapat kesesuaian dengan RENSTRA BPMPD Tahun 2011-2016. Selain itu Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun sudah menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia sehingga mampu memenuhi target capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan banyaknya kegiatan yang mencapai telah mencapai target sasaran yang ditentukan menunjukkan keberhasilan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan program dan



Kegiatan serta sebagai bahan evaluasi di tahun-tahun selanjutnya. Sehingga setiap tahunnya akan ada peningkatan kinerja yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.

- **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2012**

kegiatan - kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang pada tahun anggaran 2012 hingga realisasi bulan Juni (Triwulan II) adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 13.560.000 sedangkan realisasinya hingga bulan Juni sebesar Rp. 4.239.775 sehingga terealisasi sebesar **31,26 %**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 9,320,225.
2. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 16.194.000. sedangkan realisasinya hingga bulan Juni sebesar Rp. 8.444.500, sehingga terealisasi sebesar **49,92 %**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 8.469.500.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 12.600.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 6.300.000, sehingga terealisasi sebesar **50.00%**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 6.300.000.



4. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 3.500.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 2.500.000 , sehingga terealisasi sebesar **71.42%**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.000
5. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 7.600.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 7.600.000, sehingga terealisasi sebesar **100.00%**.
6. Kegiatan Rapat –rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 33.450.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 8.639.000 , sehingga terealisasi sebesar **35.82%**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 24.811.000 Kegiatan Rapat –rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
7. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 20.190.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 15.990.000 , sehingga terealisasi sebesar **79.19%**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 4.200.000
8. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pengadaan Kelengkapan dan Alat Kebersihan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 1.500.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 500.000 , sehingga



- terrealisasi sebesar **33.33%**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 1000.000
9. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 3.000.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 1.225.605 , sehingga terealisasi sebesar **40.85%**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 10774.395
 10. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pembayaran Honorarium TTK Kab. Pandeglang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 11.5110.500 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 6.669.000 , sehingga terealisasi sebesar **58.19%**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 4.812.500
 11. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 13.200.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 12.855.000 , sehingga terealisasi sebesar **97.38%**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 345.000
 12. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pengadaan Mebeleur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 13.600.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 13.425.000 , sehingga terealisasi sebesar **98.71%**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 175.000
 13. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 6.190.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 6.065.000 , sehingga terealisasi sebesar **97.98%**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 125.000
 14. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 22.000.000



sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 4.950.000 , sehingga terealisasi sebesar **22.50%**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 17.050.000

15. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala Mebeleur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 4.500.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 4.500.000 , sehingga terealisasi sebesar **100%**.
16. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 2.850.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 1.050.000 , sehingga terealisasi sebesar **36.84%**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 1.800.000
17. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pengadaan Khusus hari-hari tertentu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 5.700.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 5.700.000 , sehingga terealisasi sebesar **100 %**.
18. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 2.100.000 dan belum terealisasi hingga bulan Juni.
19. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 8.400.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 2.800.000 , sehingga terealisasi sebesar **33.33%**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 5.600.000
20. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pengelolaan aset SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp.4.500.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni



sebesar Rp. 1.750.000 , sehingga terealisasi sebesar **38.89%**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 2.750.000

21. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 5.500.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 5.375.000 , sehingga terealisasi sebesar **97.72%**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 125.000
22. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 1.000.000 dan belum teralisasi hingga bulan Juli.
23. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 90.0000 dan belum terealisasi hingga bulan juni.
24. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 50.000.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 27.810.000 , sehingga terealisasi sebesar **55.62%**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 22.190.000
25. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 25.000.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 2.462.150 , sehingga terealisasi sebesar **9.84%**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 22.537.850
26. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pembinaan Administrasi Proyek PNPM Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 500.000.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 113.278.000 , sehingga



- terrealisasi sebesar **22.65%**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 386.772.000.
27. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 90.000.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 73.145.000 , sehingga terealisasi sebesar **81.27%**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 125.000
 28. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Data Base Desa Pesisir Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 25.000.000 dan sampai bulan juni belum terealisasi.
 29. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Rapat Koordinasi Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan, kecamatan dan Kabupaten Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 135.000.000 dan sampai bulan juni belum terealisasi.
 30. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pelaksanaan Musrenbangdes Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 50.000.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 49.729.000 , sehingga terealisasi sebesar **99.45%**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 175.000.
 31. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat pedesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 50.000.000 dan sampai bulan juni belum terealisasi
 32. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 300.000.000 dan sampai bulan juni belum terealisasi
 33. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Sarana Prasarana Posyandu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 200.000.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 86.121.000 , sehingga terealisasi sebesar **43.06%**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 113.879.000.



34. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 65.000.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 58.535.000 , sehingga terealisasi sebesar **90.65%**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp.6.465.000.
35. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pemekaran Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 30.000.000 dan sampai bulan juni belum terealisasi.
36. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pembinaan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 50.000.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 16.758.000 , sehingga terealisasi sebesar **33.51%**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 33.242.000.
37. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Penyusunan Data Inventaris Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 25.000.000 dan sampai bulan juni belum terealisasi.
38. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Penetapan dan penegasan batas wilayah desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 200.000.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 25.887.500 , sehingga terealisasi sebesar **12.94%**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 174.112.500
39. Jumlah dana yang direncanakan untuk kegiatan Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp. 15.000.000 sedangkan realisasinya sampai bulan Juni sebesar Rp. 14.500.000 , sehingga terealisasi sebesar **96.67%**. Dan memiliki sisa pagu anggaran sebesar Rp. 500.000



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa belum memiliki Tolak Ukur dan Indikator Kinerja yang akan diuji seperti yang sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Dalam menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanannya dilihat dari hasil yang diperoleh dari setiap kegiatan yang diharapkan tepat sasaran. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa lebih bersifat sebagai Fasilitator dan Leading sektor desa. Dimana hal-hal yang berhubungan dengan urusan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Rumusan isu strategis pembangunan merupakan refleksi dari hasil kajian terhadap :

- 1) Kebijakan/regulasi Pemerintah Daerah;
- 2) Evaluasi dan pencapaian pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya;
- 3) Identifikasi terhadap seluruh potensi, permasalahan, peluang dan ancaman baik yang bersifat *existing* maupun potensi yang kemungkinan timbul pada masa yang akan datang.

Dengan demikian, isu-isu strategis pada dasarnya menjadi gambaran komprehensif mengenal *existing* wajah Kabupaten Pandeglang saat ini, yang berada pada lingkup Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa sekaligus menjadi agenda besar dimana pemikiran, tenaga, dan anggaran akan dicurahkan guna memberikan kontribusi dalam memperbaiki wajah daerah Kabupaten Pandeglang secara bertahap.

Seiring dengan perjalanan dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Pandeglang yang berkaitan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dapat diidentifikasi isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2016 adalah :



- (1) Pertumbuhan perekonomian daerah
- (2) Ketertinggalan, kemiskinan, ketahanan Pangan, tingkat pendidikan masyarakat
- (3) Penataan ruang, pengelolaan sumberdaya dan pelestarian lingkungan
- (4) Tata kelola pemerintahan desa

Sedangkan isu strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 adalah :

- **Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

- a. Isu Strategis

- 1) Perkuatan basis ekonomi kerakyatan dengan optimalisasi segenap potensi.
- 2) Pelatihan Bagi BUMDesa

- **Ketertinggalan, kemiskinan, ketahanan Pangan, dan Tingkat Pendidikan Masyarakat.**

- a. Isu Strategis

Peningkatan perekonomian Desa dan Pengurangan Desa tertinggal

- **Tata Kelola Pemerintahan Desa**

- a. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa.
- b. Minimnya APBD dalam rangka reformasi birokrasi secara total.







2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang melalui berbagai kegiatan.

Rancangan awal dari RENJA 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa meliputi 13 Program dan 37 Kegiatan dengan Jumlah Pagu anggaran sebesar Rp. 1.480.000.000 (*Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*). Kegiatan yang disusun pada rancangan awal RENJA 2013 belum memasukkan usulan dari masyarakat melalui Musrenbang baik di tingkat Desa maupun Tingkat Kecamatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam RENJA 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ada beberapa kegiatan yang merupakan usulan dari masyarakat. Usulan tersebut merupakan hasil dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) yang kemudian diusulkan ke tingkat Kecamatan, hingga Kabupaten yang kemudian hasilnya dipilah dan dirumuskan kepada SKPD terkait. Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ada 6 kegiatan dari 4 Program yang merupakan Usulan Masyarakat yang terdiri dari :

1. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
 - Pendidikan dan pelatihan kader posyandu
2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - Pelatihan aparatur desa dalam bidang pemerintahan desa
3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
 - Pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa
4. Program Penyediaan dan Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
 - Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Desa
 - Pengadaan sarana dan prasarana posyandu
 - Pembangunan kios pasar desa



Semua Program usulan masyarakat tersebut sudah sesuai dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa antara lain sebagai berikut :

- Tugas Pokok

Dalam rangka meningkatkan kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang semakin efektif dan efisien serta pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

- Fungsi

Sejalan dengan terselenggaranya tugas pelayanan kepada masyarakat yang diemban oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang, maka perlu didukung dan ditunjang oleh fungsi dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun di bentuknya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan wajib di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- b. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- c. Pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan Misi pemerintah 2009-2014, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Prioritas Nasional di bawah ini bertujuan untuk sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang.

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Peningkatan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas dari pemerintah mendatang. Wujud akhir dari perbaikan kesejahteraan akan tercermin pada peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran dan perbaikan kualitas hidup rakyat. Perbaikan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan melalui sejumlah program pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

Selain itu perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

Maksud ditetapkannya Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah agar dapat mempertanggungjawabkan kinerja yang diukur dari sejauhmana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.



Diharapkan Penyusunan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2013 juga dimaksudkan agar Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mampu berkarya dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 adalah :

1. Untuk menjabarkan arahan RENSTRA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2011 – 2016 ke dalam rencana kerja Badan Pemberdayaaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
2. Menjabarkan visi dan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2011 – 2016 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional ;
3. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah

Program dan kegiatan yang disusun dalam RENJA 2013 dimaksudkan untuk turut mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Program dan Kegiatan yang ada pada Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan Misi ke - 1 (Meningkatkan perekonomian daerah berbasis perekonomian dan pariwisata) dengan Program yang terkait adalah Program :

1. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2. Program Pemberdayaan masyarakat
3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
4. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan



5. Program Penyediaan dan Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik

Dan sesuai Misi ke- 6 (Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah)

Program terkait dengan Misi ke -6 adalah :

- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
- Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan;
- Program Pengembangan Otonomi Daerah;
- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan

b. Uraian program dan kegiatan

Jumlah program dan jumlah kegiatan. Jumlah Program pada RENJA 2013 sebanyak 12 Program dan 32 Kegiatan

Program

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Program operasional juga merupakan penjabaran rinci tentang langkah – langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan dimana penjabaran program operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

- 3.3.1.1 Program Pelayanan Administrasi Kantor
- 3.3.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3.3.1.3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 3.3.1.4 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi.
- 3.3.1.5 Program Pemberdayaan Masyarakat;
- 3.3.1.6 Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah;
- 3.3.1.7 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- 3.3.1.8 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;



- 3.3.1.9 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
- 3.3.1.10 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan;
- 3.3.1.11 Program Pengembangan Otonomi Daerah;
- 3.3.1.12 Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, kebijakan dan program di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana yang telah ditetapkan, maka disusunlah rencana program kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 dimana program kegiatan tersebut diwujudkan dalam kegiatan belanja langsung dan tidak langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten Pandeglang, dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 4.089.905.000,- (*Empat Miyar Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah*).

Sesuai dengan rencana kinerja tahunan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang Tahun 2013, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan indikator kerjanya (input, output, outcome) adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 94.413.500

Output : Jumlah kelengkapan dan alat kebersihan.

Jumlah alat tulis kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah barang cetakan

Jumlah alat – alat listrik

Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai.

1.2. Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 35.000.000,-

Output : Jumlah Rapat.

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah



- Outcome : Tercapainya Efektipitas kerja.
- 1.3. Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran.
- Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 41.580.000,-
- Output : Jumlah pemakaian listrik.
 Jumlah pemakaian telepon / internet
 Jumlah pemakaian air
 Jumlah koran / majalah
 Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
 Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor
 Jumlah Tenaga Operator Komputer
 Jumlah Penggandaan Fotocopy
- Outcome : Tersedianya Administrasi Kantor.
- 1.4. Pembayaran Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Kabupaten Pandeglang.
- Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 18.011.500,-
- Output : Jumlah TKK.
- Outcome : Terpenuhinya kesejahteraan TKK.
- 2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.**
- 2.1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.
- Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 100.000.000,-
- Output : Jumlah gedung kantor yang terpelihara
- Outcome : Terpeliharanya inventaris daerah .
- 2.2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
- Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 32.000.000,-
- Output : Jumlah perizinan kendaraan dinas / oprasional
 Jumlah kendaraan dinas / oprasional layak pakai
- Outcome : Meningkatkan mobilitas aparatur dalam pelaksanaan tugas.
- 2.3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
- Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 7.500.000,-
- Output : Jumlah peralatan kantor yang terpelihara
- Outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor.



2.4. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional

Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 250.000.000,-

Output : Terpeliharanya kendaraan Dinas.

Outcome : Meningkatnya mobilitas aparatur dalam melaksanakan tugas.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

3.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan

Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 12.900.000,-

Output : Jumlah laporan bulanan realisasi keuangan

Jumlah laporan akhir tahun

Jumlah laporan semesteran

Outcome : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pegawai.

4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi.

4.1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD.

Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 9.000.000,-

Output : Dokumen RKA

Dokumen DPA

Dokumen RENJA

Dokumen TAPKIN

Dokumen IKU

Dokumen Forum SKPD

Dokumen RKT

Outcome : Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD.

4.2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 4.500.000,-

Output : Jumlah Dokumen LAKIP

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan

Jumlah Dokumen LPPD

Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Bulanan.

Outcome : Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Evaluasi.



5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

5.1. Kegiatan Pameran Pembangunan.

- Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 15.000.000,-
 Output : Terlaksananya Pemeran Pembangunan.
 Outcome : Terpublikasinya hasil – hasil kegiatan pembangunan

6. Program Pemberdayaan Masyarakat.

6.1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

- Input : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp 40.000.000,
 Output : Buku Organisasi LPM
 Outcome : Tersalurkannya buku organisasi LPM.

6.2. Kegiatan Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEKDES)

- Input : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 70.000.000-
 Output : Jumlah Gelar Teknologi Tepat Guna yang diikuti.
 Jumlah Produk Teknologi Tepat Guna yang dipromosikan
 Outcome : Menggali potensi produk unggulan TTG di Kabupaten Pandeglang dengan memberdayakan posyantekdes.

6.3. Kegiatan Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) PNPM - MP

- Input : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 500.000.000,-
 Output : Jumlah pelaksanaan PNPM – MP Tingkat Kabupaten.
 Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan
 Outcome : Tercapainya Pengadministrasian proyek yang akuntabel

6.4. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

- Input : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 25.000.000-
 Output : Terselenggaranya Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tk.Kabupaten
 Outcome : Meningkatnya semangat gotong royong masyarakat.

6.5. Kegiatan Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan

- Input : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 100.000.000,-
 Output : - Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan pembinaan dan penilaian lomba desa/kelurahan.
 - Jumlah Juara Lomba Desa/kelurahan.



- Jumlah des/kelurahan yng di ikutsertakan dalam lomba desa/kelurahan tingkat Provinsi Banten.

Outcome : Meningkatnya kualitas desa/kelurahan.

6.6 . Kegiatan Pendampingan Bhakti TNI/TMMD/TMSS

Input : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 25.000.000,-

Output : Jumlah kegiatan pendampingan pelaksanaan bhakti TNI/TMMD/TMSS

Outcome : Terkoordinasikannya kegiatan kemanunggalan TNI dan Masyarakat.

6.7. Kegiatan Pemberdayaan Pasar Desa

Input : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 25.000.000,-

Output : Jumlah pasar desa yang dibina pengelolaannya dalam rangka penilaian tingkat Provinsi

Outcome : Terbinanya Pasar Desa.

6.8. Kegiatan Fasilitas Pembentukan BPD

Input : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 100.000.000,-

Output : Jumlah BPD yang terfasilitasi pembentukannya

Outcome : Terpilihnya ketua BPD

6.9. Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang – undangan Pemerintah Daerah.

Input : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 25.000.000,-

Output : Jumlah aturan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Outcome : Tersusunnya peraturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.

6.10. Kegiatan Penetapan dan Penyusunan Batas Desa

Input : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 150.000.000,-

Output : Jumlah penetapan batas desa yang akurat

Outcome : Batas desa yang jelas dan ditegaskan dalam perundang – undangan.



7. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.

7.1. Kegiatan Penunjang P2WKSS

Input : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 15.000.000,-

Output : Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di lokasi P2WKSS

Outcome : Terpadunya pelaksanaan peserta pelatihan.

7.2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kader Posyandu.

Input : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 150.000.000,-

Output : Jumlah kader posyandu yang mendapatkan pelatihan

Outcome : Meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan.

8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

8.1. Kegiatan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Input : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 80.000.000,-

Output : Jumlah desa percontohan yang melaksanakan aplikasi profil desa / kelurahan.

Jumlah komputer yang diberikan untuk aplikasi profil desa/kelurahan.

Jumlah pelatihan yang dilaksanakan.

Outcome : Tersedianya data yang komprehensif mengenai data desa dan kelurahan.

8.2. Kegiatan Fasilitas dan Monitoring Musrenbang Desa/Kelurahan

Input : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 50.000.000,-

Output : Jumlah Monitoring Pelaksanaan Monitoring desa/kelurahan

Jumlah Personil Tim Monitoring tingkat Kabupaten

Jumlah dokumen pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan

Outcome : Terkoordinasikannya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

8.3. Kegiatan Operasional Pengelolaan DAD

Input : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 50.000.000,-

Output : Jumlah kegiatan pendampingan dan fasilitasi DAD

Outcome : Terkelolanya Dana Alokasi Desa (DAD) dengan baik.



9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

9.1. Kegiatan Pelatihan Aparatur Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa.

Input : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 185.000.000,-

Output : Terselenggaranya pelatihan bagi aparatur desa dalam manajemen pemerintahan desa.

Outcome : Meningkatnya kualitas aparatur desa dalam manajemen pemerintahan desa.

10. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

10.1. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa.

Input : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 15.000.000,-

Output : Tersedianya tenaga manajemen BUM Desa.

Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta.

11. Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Publik.

11.1. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Desa.

Input : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 450.000.000,-

Output : Jumlah kantor desa yang terbangun.

Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

11.2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu.

Input : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.250.000.000,-

Output : Jumlah Posyandu yang terbangun.

Outcome : Tersedianya fasilitas pelayanan posyandu.

11.3. Kegiatan Pembangunan .Kios Pasar Desa.

Input : Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 165.000.000,-

Output : Jumlah Pasar desa yang terbangun.

Outcome : Tersedianya fasilitas pasar desa.

- c. Rumusan Program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKP, baik jenis program/kegiatan, dan pagu indikatif. Hal ini dikarenakan pada awal perencanaan RENJA tidak mengakomodir usulan masyarakat melalui Musrenbang. Pada Rencana Renja yang sudah diperbaharui usulan-usulan masyarakat melalui Musrenbang dimasukkan ke dalam Program kerja dan



Kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2013. Sehingga diharapkan adanya peningkatan dalam Pembangunan.

BAB VI PENUTUP

RENJA 2013 ini diharapkan dapat berjalan sesuai rencana dan output yang diharapkan dapat tercapai dan kegiatan tersebut didukung dengan ketersediaan anggaran. Dalam Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan Program dan Kegiatan sesuai dengan kaidah_kaidah Pelaksanaan. Untuk itu sebelum memulai kegiatan diharapkan membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan SOP Kegiatan agar pelaksanaan kegiatan dapat memenuhi output yang diharapkan.

Pada akhirnya, dengan adanya RENJA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2013 ini, diharapkan nantinya pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara terarah, sistematis dan tepat sasaran. Sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksana dengan optimal.

Pandeglang, Juli 2012

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Pandeglang



NO	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH	PERMASALAHAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1.	<p>Meningkatkan perekonomian daerah berbasis perekonomian dan pariwisata</p> <p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2. Program Pemberdayaan masyarakat 3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 4. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 	<p>Peningkatan perekonomian desa dan pengurangan desa tertinggal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran 2. Keterbatasan Sumber Daya manusia 3. Kurang Optimalnya kordinasi lintas sektoral 4. Rendahnya daya saing 5. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa 6. Masih Terdapat Budaya KKN 7. Masih rendahnya infrastruktur nfrastruktur pedesaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemauan yang tinggi dari masyarakat 2. Modal kultural gotong royong terbukti masih cukup memberikan ruang gerak masyarakat dalam menghadapi permasalahannya. 3. Banyaknya sektor informal tumbuh di masyarakat desa. 4. Otonomi daerah memungkinkan daerah membuat kebijakan yang pro KUKM terutama di pedesaan. 5. Potensi peran perempuan dalam pembangunan pedesaan



2.	<p>Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah</p> <p>Program :</p> <p>1. Program Pengembangan Otonomi Daerah</p> <p>2. Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa</p> <p>3. Program Pembinaan dan peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan</p>	<p>Tata kelola pemerintahan yang belum berjalan secara optimal</p>		
----	--	--	--	--



**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014
KABUPATEN PANDEGLANG**

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014			Instansi Pusat/SKPD Provinsi Penanggung Jawab		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
					APBD (Rp)	APBD Prov (Rp)			APBN (Rp)	APBD (Rp)		APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)
1	2	3	4	5	6			7	8	9			10
1 22 xx	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa				4,089,905,000					4,294,400,250			
1 22 1.22.01 xx	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif			189,005,000					198,455,250			
1 22 1.22.01 xx XX	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana Output : Jumlah Kelengkapan dan alat kebersihan : Jumlah alat tulis kantor : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Jumlah Barang Cetak : Jumlah Alat-alat Listrik Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai		10 item 15 Item 17 Item 5 Item 5 Item	94,413,500			(5,586,500)	10 item 15 Item 17 Item 5 Item 5 Item	99,134,175			
1 22 1.22.01 xx XX	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Input : Dana Output : Jumlah Rapat : Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah : Jumlah perjalanan dinas luar daerah Outcome : Tercapainya Efektivitas Kerja		12 Bulan 12 Bulan 12 bulan	35,000,000				12 Bulan 12 Bulan 12 bulan	36,750,000			
1 22 1.22.01 xx XX	Layanan Administrasi Perkantoran	Input : Dana Output : Jumlah Pemakaian Listrik : Jumlah Pemakaian Telepon/internet : Jumlah Pemakaian air : Jumlah koran/majalah : Jumlah Tenaga Keamanan Kantor : Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor : Jumlah Tenaga Operator Komputer : Jumlah Penggunaan Fotocopy Outcome : Tersediannya Administrasi Kantor		12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 4 orang 3 orang 2 orang 12 Bulan	41,580,000		3,700,000	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 4 orang 3 orang 2 orang 12 Bulan	43,659,000				
1 22 1.22.01 xx XX	Pembayaran Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Kabupaten Pandeglang	Input : Dana Output : Jumlah TTK Outcome : Terpenuhinya kesejahteraan TTK		5 orang 90%	18,011,500		6,500,000	5 orang 90%	18,912,075				
1 22 1.22.01 xx	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur yang representatif			389,500,000					408,975,000			
1 22 1.22.01 xx xx	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana Output : Jumlah gedung kantor yang terpelihara Outcome : Terpeliharanya inventaris daerah		1 Lokal 90%	100,000,000			1 Lokal 90%	105,000,000				
1 22 1.22.01 xx xx	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Input : Dana Output : Jumlah Perizinan kendaraan dinas/operasional : Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai Outcome : Meningkatkan mobilitas aparatur dalam pelaksanaan tugas		2 unit roda 4/ 9 unit roda 2 2 unit roda 4/ 9 unit roda 2 90%	32,000,000			2 unit roda 4/ 9 unit roda 2 2 unit roda 4/ 9 unit roda 2 90%	33,600,000				
1 22 1.22.01 xx xx	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Input : Dana Output : Jumlah peralatan kantor yang terpelihara Outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor		5 item 90%	7,500,000			5 item 90%	7,875,000				

1	22	1.22.01	xx	xx	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Input : Dana Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai Outcome : Meningkatkan mobilitas aparatur dalam pelaksanaan tugas	1 unit mobil roda 4 90%	250,000,000			1 unit mobil roda 4 90%	262,500,000			
1	22	1.22.01	xx		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang efektif		12,900,000				13,545,000			
1	20	1.22.53	xx		Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan	Input : Dana Output : Jumlah laporan bulanan realisasi keuangan : Jumlah laporan akhir tahun : Jumlah laporan semesteran Outcome : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pegawai	12 Dokumen 1 dokumen 2 dokumen 90%	12,900,000			12 Dokumen 1 dokumen 2 dokumen 90%	13,545,000			
1	22	1.22.01	xx		Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi			13,500,000				14,175,000			
1	22	1.22.01	xx		Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Input : Dana Output : Dokumen RKA : Dokumen DPA : Dokumen Renja : Dokumen TAPKIN : Dokumen IKU : Dokumen Forum SKPD : Dokumen RKT Outcome : Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD	2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	9,000,000			2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	9,450,000			
1	22	1.22.01	xx		Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD	Input : Dana Output : Jumlah Dokumen LAKIP Jumlah Dokumen Laporan Tahunan JUmlahDokumen LPPD Jumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan Outcome : Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Evaluasi	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 90%	4,500,000			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 90%	4,725,000			
1	22	1.22.01	xx		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang koordinatif dan Stimulan		15,000,000				15,750,000			
1	22	1.22.01	xx	xx	Pameran Pembangunan	Input : Dana Output : Terlaksananya Pameran Pembangunan Outcome : Terpublikasinya hasil-hasil kegiatan pembangunan	1 Keg 90%	15,000,000			1 Keg 90%	15,750,000			
1	22	1.22.01	xx		Program Pemberdayaan Masyarakat	Terberdayakannya masyarakat		1,060,000,000				1,113,000,000			
1	22	1.22.01	xx	xx	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Input : Dana Output : Buku Organissi LPM Outcome : Tersalurkannya buku Organisasi LPM	3390 buku 90%	40,000,000			3390 buku 90%	42,000,000			
1	22	1.22.01	xx	xx	Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna	Input : Dana Output : Jumlah Gelar Teknologi Tepat Guna yang diikuti : Jumlah Produk Teknologi Tepat Guna yang dipromosikan Outcome : Menggali potensi produk unggulan TTG di Kabupaten Pandeglang dengan memberdayakan Posyantekdes.	2 Kegiatan 10 Produk 90%	70,000,000			2 Kegiatan 10 Produk 90%	73,500,000			

1	22	1.22.01	xx	xx	Pembinaan Administrasi Proyek	Input : Dana		500,000,000			-	525,000,000			
---	----	---------	----	----	-------------------------------	--------------	--	-------------	--	--	---	-------------	--	--	--

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2012
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2013
KABUPATEN PANDEGLANG**

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Lembar dari.....

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2012 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013			Instansi Pusat/SKPD Provinsi Penanggung Jawab		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
					APBD (Rp)	APBD Prov (Rp)			APBN (Rp)	APBD (Rp)		APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)
1	2	3	4	5	6			7	8	9			10
1 22	xx	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa			896,411,500					896,411,500			
1 22		Pelayanan Administrasi Perkantoran			205,061,500					205,061,500			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Input : Dana Output : Terbiayainya kebutuhan dasar rumah tangga kantor. Outcome : Tersedianya sarana komunikasi, air bersih dan listrik untuk operasional kantor.	12 Bln 90%	13,560,000 12				13,560,000			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Input : Dana Output : Tersedianya Peralatan Kantor Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai	12 Bln 90%	20,000,000			12 Bln 90%	20,000,000			
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Input : Dana Output : Terbiayainya jasa kebersihan dan keamanan Outcome : Terciptanya suasana lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif bagi pegawai.	12 Bln 90%	16,800,000			12 Bln 90%	16,800,000			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Input : Dana Output : Terbiayainya pengadaan barang cetakan Outcome : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln 90%	5,000,000			12 Bln 90%	5,000,000			
		Rapat-Rapat Koordinasi ke dalam dan Konsultasi Keluar Daerah		Input : Dana Output : Terselenggaranya koordinasi dengan instansi terkait. Outcome : Tercapainya efektivitas dan efisiensi kerja.	12 Bln 90%	45,000,000			12 Bln 90%	45,000,000			
		Peningkatan Kelengkapan Administrasi, Ketatausahaan, Kepegawaian dan Kearsipan		Input : Dana Output : Terselenggaranya pengelolaan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian dan kearsipan. Outcome : Terkelolanya administrasi, ketatausahaan, kepegawaian dan kearsipan dengan baik.	12 Bln 90%	20,190,000			12 Bln 90%	20,190,000			
		Layanan Administrasi Kantor		Input : Dana Output : Terbiayainya pembelian ATK Kantor Outcome : Tersedianya Kebutuhan ATK Kantor	12 Bln 90%	60,000,000			12 Bln 90%	60,000,000			
		Pengadaan Kelengkapan dan Alat Kebersihan		Input : Dana Output : Tersedianya alat kebersihan kantor Outcome : Terciptanya kebersihan di lingkungan kantor	12 Bln 90%	3,000,000			12 Bln 90%	3,000,000			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Input : Dana Output : Tersedianya alat rumah tangga kantor Outcome : Meningkatnya Kinerja	12 Bln 90%	10,000,000			12 Bln 90%	10,000,000			
		Pembayaran Honorarium Tenaga Kerja Kontrak		Input : Dana Output : Terpenuhinya honor TTK Outcome : Terpenuhinya kesejahteraan TTK	12 Bln 90%	11,511,500			12 Bln 90%	11,511,500			

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2012 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013				Instansi Pusat/SKPD Provinsi Penanggung Jawab	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
					APBD (Rp)	APBD Prov (Rp)			APBN (Rp)	APBD (Rp)	APBD Prov (Rp)		APBN (Rp)
1	2	3	4	5	6			7	8	9			10
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			628,200,000					628,200,000			
		Pengadaan Peralatan Gedung		1 Pkt 90%	13,200,000				1 Pkt	13,200,000			
		Penataan Gedung Kantor		1 Pkt 90%	100,000,000				1 Pkt	100,000,000			
		Pengadaan Mebeuler		1 Pkt 90%	30,000,000				1 Pkt	30,000,000			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		1 Pkt 90%	15,000,000				1 Pkt	15,000,000			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas		1 Pkt 90%	30,000,000				1 Pkt	30,000,000			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor		1 Pkt 90%	10,000,000				1 Pkt	10,000,000			
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		2 buah roda 4, 2 buah roda 2 90%	430,000,000				2 buah roda 4, 2 buah roda 2 90%	430,000,000			
		Peningkatan Disiplin Aparatur			6,750,000					6,750,000			
		Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu		1 Pkt 90%	6,750,000				1 Pkt 90%				
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			18,900,000					18,900,000			
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		12 Bln 90%	6,000,000				12 Bln 90%	6,000,000			
		Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan		12 Bln 90%	8,400,000				12 Bln 90%	8,400,000			
		Pengelolaan Asset SKPD		12 Bln 90%	4,500,000				12 Bln 90%	4,500,000			

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2012 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013			Instansi Pusat/SKPD Provinsi Penanggung Jawab	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
					APBD (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)			APBD (Rp)	APBD Prov (Rp)		APBN (Rp)
1	2	3	4	5	6			7	8	9			10
		Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi			12,500,000					12,500,000			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD		Input : Dana Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD Outcome : Tersusunnya DPA dan Rencana Kerja SKPD	1 Pkt 90%	7,500,000				1 Pkt 90%	7,500,000		
		Penyusunan Dokumen Pelaporan		Input : Dana Output : Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD Outcome : Tersusunnya SPJ dan LAKIP SKPD	1 Pkt 90%	5,000,000							
1	22.01	47		Program Pengembangan Potensi Masyarakat dan Desa		25,000,000					25,000,000		
1	22.01	47	xx	Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten	Input : Dana Output : Partisipasi dalam Pameran Pembangunan Outcome : Terpublikasinya hasil-hasil kegiatan pembangunan	1 Keg 90%	25,000,000			1 Keg 90%	25,000,000		

4,672,411,500

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN PANDEGLANG

Drs. RAMADANI, M.Si
NIP. 19680514 198803 1 002

LAMPIRAN 1.

EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN LALU

SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Pandeglang
TAHUN : 2011

Sasaran Strategis	Kinerja				
	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Terselenggaranya Administrasi perkantoran yang efektif	Tersedianya Sarana Komunikasi, Air bersih dan Listrik Kantor	Bulan	12	12	100.00
	Terpenuhinya Upah Kerja	orang	6	6	100
	Tersedianya Barang Cetak	pkt	12	12	100
	Tersedianya Alat - alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	100
	Terselenggaranya Koordinasi dengan Instansi Terkait	pkt	12	12	100
	Tersedianya Kearsipan yang Memadai	bulan	12	12	100.00
	Terpenuhinya Honorarium Tenaga Kontrak Kerja	orang	4	4	100
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor yang Memadai (mebulair) - Meja Kerja	set	1 Set	1 Set	100
	- Kursi Tamu	set	1 Set	1 Set	100
	Terpeliharanya Gedung Kantor	gedung	1	1	100.00
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	unit	2	2	100.00
	Terpeliharanya Peralatan Kantor	bulan	12	12	100.00
Tercapainya Sistem Pelaporan - pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang baik	Adanya Pelaporan Keuangan Akhir tahun	bulan	12	12	100.00
	Adanya Pelaporan Neraca SKPD	bulan	12	12	100.00
	Adanya Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan	bulan	12	12	100.00
	Tersusunnya Aset SKPD	bulan	12	12	100.00
Tersusunnya Rencana Kerja dan Lakip SKPD	Adanya Penyusunan Dokumen Renstra SKPD 2011-2016	bulan	12	12	100.00
	Tersusunnya Dokumen Lakip 2010,Laporan Bulanan, Triwulan, Tahunan	bulan	12	12	100.00
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Sosial dan Ekonomi Pedesaan	Terselenggaranya Sosbimtek bagi Lembaga dan Organisasi Masy. Pedesaan	desa/kel	335	335	100.00
	Terfasilitasinya Potensi Produk Unggulan TTG Kab. Pandeglang	kegiatan	1	1	100.00
	Terselenggaranya Bulan Bhakti Gotong Royong	orang	500	500	100.00
	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi (PAP) PNPM-MP	Kecamatan	33	33	100.00
	Terpilihnya Desa/Kel Terbaik Secara Teknis dan Administrasi	desa/kel	12	12	100.00
	Tersusunnya Profil Desa/Kel se - Kab. Pandeglang	desa/kel	335	335	100.00
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Terselenggaranya Pembinaan Teknis dan Administrasi KMPD	Kecamatan	35	35	100.00
	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	kecamatan	35	35	100.00

1	2	3	4	5	6
Meningkatnya peran kaum perempuan dalam pembangunan khusus di pedesaan	Tersedianya sarana Prasarana Mebulair dan baju kader Posyandu	desa	14	14	100.00
Meningkatnya pengembangan otonomi daerah baik dalam ketentuan peraturan perundangan maupun implementasinya	Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa dengan baik	desa	12	12	100.00
	Terselenggaranya Pemekaran Desa	desa	1	1	100.00
	Terselenggaranya Pembinaan Teknis dan Administrasi Pemerintahan Desa	desa	322	322	100.00
	Tersusunnya Peraturan Mengenai Desa	buku	210	210	100.00
	Tersalurkannya Buku Administrasi Desa yang Tertib Administrasi.	buku	4,950	4,950	100.00
Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan, desa dan kelurahan melalui pembinaan	Terselenggaranya Rapat Desa	desa	322	322	100.00

Jumlah Anggaran Program Tahun 2011

: Rp. 1.362.503.500

Jumlah Realisasi Anggaran Prgram Tahun 2011

: Rp. 1.348.116.230

6190000	248866
6065000	250000
0.97980614	0.995464
100	100
97.9806139	99.5464

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Pandeglang

TAHUN : 2013

Sasaran Strategis	Kinerja			
	Indikator	Satuan	Target	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Terselenggaranya Administrasi perkantoran yang efektif	Tersedianya Sarana Komunikasi, Air bersih dan Listrik Kantor	Bulan	12	90
	Tersedianya Peralatan Kantor	Bulan	12	90
	Terbiayainya jasa kebersihan dan keamanan	orang	7	90
	Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan	pkt	12	90
	Tersedianya Alat - alat Tulis Kantor	Bulan	12	90
	Terselenggaranya Koordinasi dengan Instansi Terkait	pkt	12	90
	Terselenggaranya pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan kearsipan	bulan	12	90
	Tersedianya kebutuhan ATK kantor	bulan	12	90
	Tersedianya alat kebersihan kantor	bulan	12	90
	Tersedianya alat rumah tangga kantor	bulan	12	90
	Terpenuhinya Honorarium Tenaga Kontrak Kerja	orang	4	90
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor yang Memadai (mebulair)		-	90
	- Meja Kerja	set	1 Set	
	- Kursi Tamu	set	1 Set	
	Tertatanya Gedung kantor	gedung	1	90
	Sarana kantor yang memadai Tersedianya sarana dan prasarana	Paket	1	90
	Terpeliharanya Peralatan Kantor	Paket	12	90
	Terpeliharanya Gedung Kantor	gedung	1	90
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	unit	2	90
	Terpeliharanya Peralatan Kantor	bulan	12	90
Tersedianya kendaraan dinas untuk operasional kantor	mobil	2	90	
Meningkatnya Disiplin Aparatur	Tersedianya pakain olahraga pegawai	Paket	1	90

Tercapainya Sistem Pelaporan - pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang baik	Adanya Pelaporan Keuangan Akhir tahun	bulan	12	90
	Adanya Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan	bulan	12	90
	Tersusunnya Aset SKPD	bulan	12	90
Tersusunnya Rencana Kerja dan Lakip SKPD	Adanya Penyusunan Dokumen Renstra SKPD 2011-2016	bulan	12	90
	Tersusunnya Dokumen Lakip 2010, Laporan Bulanan, Triwulan, Tahunan	bulan	12	90
Meningkatnya Pengembanagan potensi masyarakat dan desa	Partisipasi dalam pameran pembangunan	Paket	1	90
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Sosial dan Ekonomi Pedesaan	Terselenggaranya Sosbimtek bagi Lembaga dan Organisasi Masy. Pedesaan	desa/kel	339	90
	Terfasilitasinya Potensi Produk Unggulan TTG Kab. Pandeglang	kegiatan	1	90
	Terselenggaranya Bulan Bhakti Gotong Royong	orang	500	90
	Terselenggaranya pendampingan pelaksanaan TMMD	kegiatan		90
	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi (PAP) PNPM-MP	Kecamatan	33	90
	Terpilihnya Desa/Kel Terbaik Secara Teknis dan Administrasi	desa/kel	12	90
	Terberdayakannya desa pesisir	Kecamatan	14	90
	Tersusunnya Profil Desa/Kel se - Kab. Pandeglang	desa/kel	339	90
Peningkatan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terselenggaranya pelatihan bagi manajemen BUMD	orang	70	90
	Terbinanya pasar desa	desa	2	90
Meningkatnya Peran Perempuan di Pedesaan	Terselenggaranya pelatihan dan tersalurkannya bagi usaha ekonomi produktif	orang	70	90
	Terbangunnya gedung posyandu	posyandu	10	90
	Tersalurkannya bantuan sarana dan prasarana posyandu	desa tertinggal	16	90
	Terpadunya kegiatan p2 WKSS	Desa	2	90
Meningkatnya pengembangan otonomi daerah baik dalam ketentuan peraturan perundangan maupun implementasinya	Terselenggaranya Pemilihan BPD	desa	326	90
	Terselenggaranya pelatihan penyusunan perundang0undangan	orang	70	90
	Tersusunnya dan terpublikasikannya data inventaris desa	desa	326	90

	Terbinanya desa	desa	326	90
	Terselenggaranya penetapan dan penegasan batas desa	desa	4	90
Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan, desa dan kelurahan melalui pembinaan	Terselenggaranya Rapat Desa	desa	326	90
	terselenggaranya pengelolaan DAD	desa	326	90
Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan desa	Terselenggaranya pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Orang	125	90
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tersalurkannya stimulan bagi masyarakat	desa	1	90
	Terkoordinasikannya pelaksanaan Musrenbangdes	desa	326	90
	Terselenggaranya bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran pembangunan desa	desa	326	90
Meningkatnya potensi masyarakat desa	Terpublikasikannya profil desa dan informasi pembangunan desa	desa/kel	326 339	90
	Terbentuknya desa binaan PMD	desa	1	90

LAMPIRAN 1.

EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN LALU

SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Pandeglang
TAHUN : 2011

Sasaran Strategis	Kinerja				
	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Terselenggaranya Administrasi perkantoran yang efektif	Tersedianya Sarana Komunikasi, Air bersih dan Listrik Kantor	Bulan	12	12	100.00
	Terpenuhinya Upah Kerja	orang	6	6	100
	Tersedianya Barang Cetak	pkt	12	12	100
	Tersedianya Alat - alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	100
	Terselenggaranya Koordinasi dengan Instansi Terkait	pkt	12	12	100
	Tersedianya Kearsipan yang Memadai	bulan	12	12	100.00
	Terpenuhinya Honorarium Tenaga Kontrak Kerja	orang	4	4	100
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor yang Memadai (mebulair) - Meja Kerja	set	1 Set	1 Set	100
	- Kursi Tamu	set	1 Set	1 Set	100
	Terpeliharanya Gedung Kantor	gedung	1	1	100.00
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	unit	2	2	100.00
	Terpeliharanya Peralatan Kantor	bulan	12	12	100.00
Tercapainya Sistem Pelaporan - pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang baik	Adanya Pelaporan Keuangan Akhir tahun	bulan	12	12	100.00
	Adanya Pelaporan Neraca SKPD	bulan	12	12	100.00
	Adanya Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan	bulan	12	12	100.00
	Tersusunnya Aset SKPD	bulan	12	12	100.00
Tersusunnya Rencana Kerja dan Lakip SKPD	Adanya Penyusunan Dokumen Renstra SKPD 2011-2016	bulan	12	12	100.00
	Tersusunnya Dokumen Lakip 2010,Laporan Bulanan, Triwulan, Tahunan	bulan	12	12	100.00
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Sosial dan Ekonomi Pedesaan	Terselenggaranya Sosbimtek bagi Lembaga dan Organisasi Masy. Pedesaan	desa/kel	335	335	100.00
	Terfasilitasinya Potensi Produk Unggulan TTG Kab. Pandeglang	kegiatan	1	1	100.00
	Terselenggaranya Bulan Bhakti Gotong Royong	orang	500	500	100.00
	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi (PAP) PNPM-MP	Kecamatan	33	33	100.00
	Terpilihnya Desa/Kel Terbaik Secara Teknis dan Administrasi	desa/kel	12	12	100.00
	Tersusunnya Profil Desa/Kel se - Kab. Pandeglang	desa/kel	335	335	100.00
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Terselenggaranya Pembinaan Teknis dan Administrasi KMPD	Kecamatan	35	35	100.00
	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	kecamatan	35	35	100.00

1	2	3	4	5	6
Meningkatnya peran kaum perempuan dalam pembangunan khusus di pedesaan	Tersedianya sarana Prasarana Mebulair dan baju kader Posyandu	desa	14	14	100.00
Meningkatnya pengembangan otonomi daerah baik dalam ketentuan peraturan perundangan maupun implementasinya	Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa dengan baik	desa	12	12	100.00
	Terselenggaranya Pemekaran Desa	desa	1	1	100.00
	Terselenggaranya Pembinaan Teknis dan Administrasi Pemerintahan Desa	desa	322	322	100.00
	Tersusunnya Peraturan Mengenai Desa	buku	210	210	100.00
	Tersalurkannya Buku Administrasi Desa yang Tertib Administrasi.	buku	4,950	4,950	100.00
Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan, desa dan kelurahan melalui pembinaan	Terselenggaranya Rapat Desa	desa	322	322	100.00

Jumlah Anggaran Program Tahun 2011

: Rp. 1.362.503.500

Jumlah Realisasi Anggaran Prgram Tahun 2011

: Rp. 1.348.116.230

6190000	248866
6065000	250000
0.97980614	0.995464
100	100
97.9806139	99.5464